Website: ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/pelangi

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PETANI MELAKUKAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE LAHAN NON PERTANIAN DI KECAMATAN KURANJI DAN KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG

Elvi Zuriyani

STKIP PGRI Sumbar

zulfaeva75@gmail.com

INFO ARTIKEL

Diterima:

Direview:

Disetujui:

Keyword:

*Farmer's decision,
Conversion of land,
Agricultural land, Non
agricultural land*

Abstract

This study examines the decision of farmers to convert agricultural land into non-agricultural land in Padang city. It is associated with widespread use of agricultural land which has now changed its function into non-agricultural land use due to construction progress. The study was conducted in Kuranji District and Koto Tangah District in Padang city. The research method used in this study is a quantitative research method, namely to determine the factors associated with the decision of farmers to convert agricultural land into non-agricultural land. The sample in this study were drawn for the non-random sampling. Respondents were people who were directly involved with the utilization of space in the area of agricultural households in particular.

PENDAHULUAN

Kota Padang dengan luas wilayah 694,96 Km² (PP No. 17 tahun 1980) memiliki jumlah penduduk sampai tahun 2007 sebesar 838.190 jiwa/km², dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan cepat yaitu sebesar 1,92% pertahun. Hal ini akan berdampak pada aspek kehidupan yang luas dan pembangunan. Tuntutan kebutuhan dasar manusia seperti pangan, papan dan lahan akan semakin meningkat. Kenyataan yang terjadi saat ini adalah luas lahan

cenderung tetap, sementara itu pertumbuhan penduduk terus meningkat sehingga rasio manusia dibandingkan dengan luas lahan nilainya lebih besar. Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tangah merupakan dua kecamatan dengan perubahan lahan pertanian ke lahan non pertanian yang cukup pesat. Hermon (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa luas perubahan tutupan lahan menjadi lahan terbangun di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan

Koto Tangah periode tahun 1994 sampai tahun 2006 cukup tinggi, terutama untuk lahan-lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Untuk lahan sawah menjadi lahan terbangun, di Kecamatan Kuranji sebesar 723, 9 Ha, dan Kecamatan koto Tangah sebesar 453,1 Ha. Di Kota Padang perubahan penggunaan lahan pertanian ke lahan non pertanian juga diakibatkan oleh aksesibilitas wilayah di Kecamatan Koto Tangah dan Kecamatan Kuranji yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Akses jalan raya by pass yang menjadi penghubung Kota Padang dengan daerah lainnya serta peningkatan sarana transportasi yang pada akhirnya memicu pembangunan tempat-tempat pelayanan lainnya, seperti pertokoan di sepanjang jalan raya by pass, bengkel, industri kecil dan menengah serta perkantoran pemerintah maupun swasta. Adanya rencana pemindahan pusat kota Padang ke kawasan pinggiran kota Padang (dalam revisi RTRW Kota Padang 2008-2028, yang belum disahkan oleh Perda Kota Padang) juga merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya perubahan alih fungsi lahan-lahan pertanian menjadi lahan-lahan non pertanian. Dalam revisi tersebut sekitar 2.900 hektar lahan pertanian akan dihapuskan, karena sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi (Singgalang, 12 Agustus 2010). Hal tersebut juga sejalan dengan perkembangan pusat pertumbuhan Kota Padang pasca bencana alam gempa. Bencana alam gempa bumi dan potensi tsunami memaksa masyarakat untuk pindah ke wilayah lain yang jauh dari potensi bencana atau ke wilayah yang lebih tinggi, yaitu ke wilayah pinggiran Kota Padang (Trisia, Ramadhani, Evelina, 2009:3). Berdasarkan fenomena perubahan penggunaan lahan pertanian ke lahan non pertanian serta dampak-dampak negatif terhadap lingkungan

fisik dan social ekonomi yang terjadi di Kota Padang, maka peneliti tertarik untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi petani melakukan alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Pada akhirnya hasil penilaian ini bertujuan untuk menyusun arahan pemanfaatan lahan-lahan pertanian yang masih tersisa di Kota Padang.

BAHAN DAN METODE

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan dengan cara sengaja (purposive) yaitu pada beberapa kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Berdasarkan (RTRW Kota Padang 2004-2013), rencana pemanfaatan ruang pada kedua wilayah ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sub-sub pusat kegiatan yang punya skala pelayanan lingkungan, yaitu Kelurahan Sungai Sapih, Kuranji dan Lubuk Minturun.
2. Sebagai koridor pengembangan intensif dan juga akan dijadikan areal pengembangan pembangunan perumahan yaitu Kecamatan Kuranji.
3. Sebagai kawasan komersil yang berpotensi untuk dikembangkan, adalah Kecamatan Kuranji (Kelurahan Sungai Sapih dan Kelurahan Kuranji) dan Kecamatan Koto Tangah (Kelurahan Lubuk Minturun dan Kelurahan Air Pacah). Wilayah yang dijadikan lokasi penelitian adalah wilayah yang masih terdapat lahan pertanian serta lahan-lahan pertanian yang berpotensi untuk dialih fungsikan ke lahan non pertanian karena berada dekat dengan pusat kota dan diiringi

oleh perkembangan fungsi-fungsi kota. Pada Kecamatan Koto Tengah, wilayah yang dijadikan lokasi penelitian adalah Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh dan Kelurahan Air Pacah. Pada Kecamatan Kuranji lokasi penelitian adalah Kelurahan Gunung Sariak dan Kelurahan Sungai Sapih.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan positivistik, yaitu pendekatan penelitian yang menyatakan bahwa pengetahuan sebagai pernyataan mengenai keyakinan atau fakta yang dapat diuji secara empirik, dapat dikonfirmasi atau dapat ditolak. Indikator-indikator yang terdapat dalam penelitian kemudian dijabarkan secara kuantitatif dalam serangkaian instrumen yang hasilnya dapat dinyatakan dengan angka.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini ditentukan dengan metode “purposive sampling”, atau ditetapkan secara sengaja, adalah rumah tangga yang berada di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tengah Kota Padang yang berada dekat dengan lahan-lahan pertanian, khususnya rumah tangga petani. Populasi ditetapkan berdasarkan strata dan kriteria, yaitu masyarakat yang melakukan konversi lahan dan masyarakat yang tidak melakukan konversi lahan. Kemudian total sampel dibagi-bagi sesuai proporsi ke tiap strata (kuota) yang telah ditetapkan, yaitu diambil sampel sebanyak 100 rumah tangga secara kuota (Singarimbun et al, 1987:155). Untuk memenuhi jumlah sampel untuk tiap strata, peneliti menetapkan untuk mengambil sebanyak

50% yang melakukan konversi dan 50% yang tidak melakukan konversi, dari keseluruhan sampel yang telah ditetapkan secara kuota. Berikut adalah jumlah sampel pada masing-masing kelurahan yang ditetapkan dengan metode “proposional to size” dengan menggunakan formula (Nazir, 1983 dalam Thesiwati, 2006:26).

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

Dimana :

n_i = jumlah sampel pada Kelurahan ke i
 N_i = jumlah populasi pada Kelurahan ke i

N = jumlah populasi seluruhnya
 (4 kelurahan)

n = jumlah sampel seluruhnya (100 rumah tangga)

Tabel 2. Populasi dan Jumlah Rumah Tangga Sampel pada Lokasi Penelitian

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah populasi (KK)	Jumlah sampel (KK)
1	Koto Tengah	Lubuk Minturun Sungai Lareh	1839	19
2	Koto Tengah	Air Pacah	1497	16
3	Kuranji	Sungai Sapih	2425	25
4	Kuranji	Gunung Sariak	3815	40
Jumlah			9576	100

Metoda Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer melalui Penggunaan kuesioner dengan daftar pertanyaan dimaksudkan untuk memperoleh data berupa jawaban tertulis dari responden. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan. Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang ada.

Analisis Data

1. Uji instrument pengumpulan data, yaitu: Uji Validitas, merupakan ketepatan dan kecermatan suatu instrument dalam mengukur apa yang

ingin diukur. Uji validita dilakukan dengan menggunakan Bivariate Pearson (Korelasi Produk Moment Pearson), dengan rumus

$$\text{rumus : } r_{ix} = \frac{n \sum ix - (\sum i)(\sum x)}{\sqrt{[n \sum i^2 - (\sum i)^2][n \sum x^2 - (\sum x)^2]}}$$

Keterangan: r_{ix} = koefisien korelasi item-total

i = skor item

x = skor total

n = banyaknya subjek

Uji Reliabilitas, digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Metode pengujian reabilitas yang digunakan adalah dengan metode Alpha adalah: (Arikunto, 2002 dalam Priyatno, 2008 25), dengan rumus:

$$R_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sum \sigma^2} \right]$$

Keterangan : r_{11} = Reliabilitas instrument

k = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma b^2$ = Jumlah varian butir

σ_1^2 = Varian total

Uji signifikansi dilakukan pada taraf signifikansi 0,05, artinya instrument dapat dikatakan reliable bila nilai alpha lebih besar dari r kritis produk moment.

2. Analisis data untuk mengetahui faktor-faktor mempengaruhi petani melakukan alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif, menggunakan analisis regresi berganda, dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6$$

Y = Frekwensi skor dari item pertanyaan

α = Nilai konstanta yang akan diperoleh

$\beta_1 - \beta_6$ = Koefisien regresi dari $X_1 - X_6$

X_1 = Frekwensi skor dari pertanyaan *Tingkat Pendidikan*

X_2 = Frekwensi skor dari pertanyaan *Faktor Ekonomi (Tingkat Pendapatan)*

X_3 = Frekwensi skor dari item pertanyaan *Perubahan tata ruang kota/perkembangan sarana dan prasarana wilayah ke wilayah pinggiran (Rencana Perubahan RTRW) (X3).*

X_4 = Frekwensi skor dari item pertanyaan *Peraturan pemerintah/UU*

X_5 = Frekwensi skor dari item pertanyaan *Potensi bencana alam*

X_6 = Frekwensi skor dari item pertanyaan *Faktor Sosial (Berkurangnya nilai-nilai kebudayaan masyarakat dalam pengelolaan lahan-lahan pertanian)*

Untuk melihat hubungan dari seluruh variabel independen (bebas) yang termasuk dalam persamaan regresi tersebut diatas akan dilakukan pengujian dengan uji-F (analisis ragam). Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak.

$$\text{Hipotesis } H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = 0$$

$$H_1 : \text{ada } \beta_i \neq 0$$

Penarikan kesimpulan : bila $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka tolak H_0

bila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka diterima H_0

Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara dua atau lebih variabel independen (X_i) terhadap variabel dependen (Y) secara serentak, dilakukan uji korelasi ganda (r). Nilai koefisien korelasi (r) berkisar antara 0 sampai 1, nilai semakin mendekati 1 maka hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya jika nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin

lemah. Selanjutnya dilakukan analisis determinasi (R^2), untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variable independen (X_i) secara serentak terhadap variable dependen (Y). Koefesien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variable independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Jika $R^2 = 0$ maka tidak ada sedikitpun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variable dependen, atau variasi variable independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variable dependen. Jika $R^2 = 1$, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variable independen terhadap variabel dependen adalah sempurna atau variasi variable independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen. Selanjutnya untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variable independen (X_i) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variable dependen (Y) maka dilakukan uji t secara parsial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Padang adalah ibukota Propinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat pulau Sumatera yang mana berada antara $0^\circ 44' 00''$ dan $1^\circ 08' 35''$ Lintang Selatan dan $100^\circ 05' 05''$ dan $100^\circ 34' 09''$ Bujur Timur. Menurut PP No. 17 Tahun 1980, Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dengan luas wilayah adalah 694,96 km². Kecamatan Koto Tangah merupakan salah satu kecamatan di Kota Padang dengan luas daerah 232,25 Km², dengan 13 kelurahan. Di sebelah utara, wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman, sebelah selatan berbatasan dengan Padang Utara dan Kecamatan Nanggalo, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kecamatan Pauh

dan sebelah Barat dengan Samudera Hindia. Kecamatan Kuranji memiliki luas wilayah 57, 41 Km², dengan batas wilayah Kecamatan Kuranji di sebelah utara dengan Kecamatan Koto Tangah, selatan dengan Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Padang Utara, barat dengan Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Koto Tangah, dan timur dengan Kecamatan Pauh. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka didapatkan bahwa terjadinya alih fungsi lahan terkait dengan beberapa faktor. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani untuk mengkonversi lahannya di Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari beberapa faktor atau variabel $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$ (Variabel Independen) terhadap variabel Y (variabel dependen) secara serentak digunakan analisis statistic dari korelasi regresi linear berganda, dengan bantuan pengolahan SPSS versi 16. Dengan menggunakan backward method, yakni dengan menghilangkan variable tidak signifikan, maka didapat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2.835 + 0.106 (X_2) + 0.660 (X_3) + 0.294 (X_4) + 0.341 (X_5) + 0.282 (X_6)$$

$$R = 0.398 \quad R\text{Square} = 0.158 \quad \text{Adj } R\text{ Square} = 0.132 \quad F\text{ Hitung} = 6.014$$

Berdasarkan pengolahan data sampel yang berjumlah sebanyak 100 responden, maka didapatkan analisis varians (ANOVA) digunakan untuk menguji dan mengetahui ada tidaknya pengaruh keenam variable independen terhadap variable dependen dalam penelitian ini. Pada Model 1, dari data hasil perhitungan diatas diketahui nilai signifikansi (sig) probabilitas $0,008 < \alpha$ 0,05. Artinya nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Untuk nilai F hitung didapatkan sebesar 3.123, yang lebih besar dari nilai F tabel yaitu sebesar

2,1976 (F hitung $3.123 > F$ table 2,1976). Artinya didapatkan kesimpulan bahwa secara bersama-sama keenam factor, yaitu tingkat pendidikan (X1), faktor ekonomi (tingkat pendapatan) (X2), perubahan tata ruang kota (X3), peraturan pemerintah (X4), potensi bencana alam (X5), pudarnya nilai-nilai budaya masyarakat petani dalam mengolah lahan-lahan pertanian (X6), berpengaruh terhadap keputusan petani mengkonversi lahan pertanian ke lahan non pertanian. Untuk mengetahui berapa besarnya sumbangan pengaruh keenam variable independen tersebut secara bersama-sama (X1-X6) terhadap variabel dependen (Y) maka dapat dilihat dari nilai indeks determinasi. Besarnya pengaruh variable independen (X1-X6) secara bersama-sama (multi regresi) terhadap Y adalah sebesar $R^2 = 0,868$ (R Square). Hal ini menunjukkan bahwa besarnya sumbangan pengaruh secara bersama-sama antara variable independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 86,8%. Dengan demikian, 86,8% faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani mengkonversi lahan pertanian ke non pertanian dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh factor tingkat pendidikan (X1), tingkat pendapatan (X2), perubahan tata ruang kota (X3), peraturan pemerintah (X4), potensi bencana alam (X5), pudarnya nilai-nilai budaya masyarakat petani dalam mengolah lahan-lahan pertanian (X6). Selebihnya sebesar 13,2% dipengaruhi oleh factor-faktor lain diluar penelitian ini. Untuk mengetahui factor-faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan petani mengkonversi lahan pertanian ke non pertanian, dilakukan dengan uji t. Dari uji t diatas maka didapatkan nilai t hitung untuk setiap variable bebas adalah; ekonomi atau tingkat pendapatan (X2) = 2.089, perubahan RTRW (X3) = 2.476, peraturan pemerintah (X4) =

2.651, potensi bencana alam (X5) = 2.124 dan perubahan nilai-nilai budaya masyarakat dalam pengelolaan lahan-lahan pertanian (X6) = 2.781. Jika dibandingkan dengan t tabel, pada taraf 5% diperoleh nilai $t_{100.0.025}$ sebesar 1.984. Nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel merupakan variabel bebas yang dengan signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat (Y).

Factor tingkat pendidikan (X1)

Berdasarkan data yang didapatkan dilapangan, rata-rata responden yang menempuh pendidikan hanya sampai di jenjang pendidikan SD adalah sebanyak 15%, tamat SLTP 39%, tamat SLTA 33% dan tamat perguruan tinggi 13%.

Terlihat pada wilayah ini, pendidikan yang ditempuh lebih banyak pada level menengah, yaitu tamat SLTP 39% dan SLTA 33% (analisis data primer). Dari uji statistik yang telah dilakukan, maka dalam penelitian ini pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani mengkonversi lahan pertanian ke non pertanian. didapatkan nilai t-hitung dari faktor pendidikan adalah sebesar 0,060 lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,984. Hal ini diperkuat dengan kesimpulan dilapangan, bahwa masyarakat yang pendidikan formal nya lebih tinggi tidak menjamin bahwa tingkat pengetahuannya tentang lahan pertanian akan lebih tinggi pula. Pendidikan informal petani akan lebih mempengaruhi perilaku mereka terhadap lahan-lahan pertanian, dimana pendidikan informal tersebut didapatkan dari pengetahuan turun temurun dan juga dari pelatihan-pelatihan yang mereka dapatkan dari penyuluhan-penyuluhan yang terkait dengan pertanian serta penghargaan mereka terhadap lahan

pertanian. Hal ini terkait dengan yang dikemukakan sebelumnya oleh (Setiawan, I., 2009) dimana secara umum kebanyakan petani di Indonesia berada pada tingkat pendidikan tidak tamat SD (59,2%), tamat SD (32,1%), SLTP (5,7%) dan SLTA 2,9%). B. Faktor ekonomi (tingkat pendapatan) (X2) Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap persepsi petani mengenai konversi lahan. Salah satu yang terkait dengan faktor ekonomi adalah pendapatan. Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh dari penghasilan pokok. Pendapatan informal adalah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan sampingan. Maka secara umum pendapatan merupakan rata-rata perolehan sejumlah uang yang diterima setiap bulannya (Hadi, dalam Thesiwati, 2006). sebanyak 60% responden mempunyai pendapatan Rp. 500.000 - < 1.000.000 (lima ratus ribu rupiah sampai dengan kecil dari 1 juta rupiah). Sedangkan pendapatan responden sebesar lebih dari 1 juta rupiah adalah sebanyak 16%, dan kecil dari lima ratus ribu rupiah adalah sebesar 24%. Pendapatan masyarakat pada wilayah penelitian ini tentunya berhubungan dengan pekerjaan responden. Pendapatan rata-rata penduduk ini jika dibandingkan dengan Upah Minimum Propinsi Sumbar tahun 2011 adalah sebesar Rp 1.055.000 (bataviase.co.id). Namun, jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata masyarakat di wilayah penelitian, hal ini masih kurang dari UMR yang ditetapkan oleh pemerintah Rp. 500.000 - < 1.000.000. Kebanyakan masyarakat dengan penghasilan Rp. 500.000 - Rp. 500.000 - < 1.000.000 maupun petani pemilik yang mempunyai lahan pertanian terbatas. Faktor inilah yang membuat masyarakat ingin beralih ke sektor lainnya dibidang pertanian. untuk meningkatkan pendapatan, masyarakat

lebih banyak beralih ke sektor jasa maupun industri dan mereka juga lebih tertarik untuk menjual lahan nya atau menyerahkan pekerjaan menggarap lahan kepada orang lain dan hasilnya di bagi dua. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka faktor ekonomi yang ditandai oleh pendapatan berpengaruh terhadap tingkat konversi lahan pertanian ke non pertanian. Hal ini terkait dengan letak lahan-lahan pertanian yang berada di kawasan pinggiran kota Padang, yang saat ini berdasarkan rencana RTRW 2008- 2028, yang akan mendorong pesat pertumbuhan pusat-pusat pelayanan dan perkantoran serta perumahan, dan membuat orang semakin banyak berpindah ke wilayah ini, karena wilayah pusat Kota Padang saat ini berpotensi terhadap bencana alam gempa bumi disertai tsunami. Faktor penarik dan faktor pendorong inilah yang pada akhirnya membuat masyarakat ingin melakukan perpindahan ke wilayah pinggir kota Padang, khususnya di lokasi penelitian. Inilah yang membuat masyarakat tertarik untuk menjual lahan-lahan pertaniannya maupun mengubahnya ke fungsi non pertanian, seperti untuk areal kompleks perumahan,dll. Faktor pendapatan masyarakat yang masih termasuk menengah ke bawah juga merupakan salah satu hal yang mendorong masyarakat membuat pilihan untuk menjual lahan pertaniannya dibandingkan mengusahakannya, karena biaya yang dikeluarkan untuk mengusahakan lahan pertanian lebih tinggi daripada hasil yang didapatkan.

Hal tersebut juga diperkuat lagi dengan minimnya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Sumbar untuk mengoptimalkan sektor pertanian yang hanya sebesar 3%, sedangkan sector pertanian merupakan penyumbang pendapatan regional domestik bruto

paling tinggi di Sumatera Barat (Singgalang, 4 Mei 2011). Tidak hanya keterbatasan anggaran saja, namun harga komoditi pertanian seperti Gabah Kering Giling dihargai sebesar Rp. 3.300/kg di tingkat petani. Selain itu, produk-produk pertanian impor yang harganya lebih murah dari produk pertanian lokal semakin membuat petani tertekan. Menurut Budiman, Y. (2005) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa faktor utama dari konversi lahan pertanian adalah ekonomi. Salah seorang responden di lokasi penelitian mengatakan bahwa ia mengalih fungsikan lahan pertanian miliknya menjadi beberapa petak rumah kontrakan. Rumah kontrakan jauh lebih menguntungkan daripada tetap mempertahankan lahannya menjadi kebun kacang atau kebun mentimun. Selain itu ia juga mengatakan bahwa hasil yang didapatkan dari usaha tani, tidak cukup untuk hidup pada masa kini karena harga barang kebutuhan yang semakin meningkat (Budiman, Y., 2005).

C. Perubahan tata ruang kota (X3) Perubahan tata ruang kota merupakan salah satu hal sangat berperan dalam mengubah tata guna lahan pada suatu wilayah. Terkait dengan penelitian ini, kota Padang sebagai ibu Kota Propinsi Sumatera Barat telah menyusun revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2008-2028. Dalam revisi tersebut sekitar 2.900 hektare lahan pertanian akan dihapuskan. Penghapusan lahan pertanian tersebut, disebabkan karena lahan pertanian tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, serta hal tersebut sebagai konsekuensi dari rencana pemindahan pusat kota Padang ke arah timur Kota Padang yang merupakan daerah dengan lahan pertanian yang cukup luas. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap perubahan tata ruang wilayah Kota Padang di 4 lokasi penelitian, yaitu

Kelurahan Gunung Sarik, Kelurahan Sungai sapih, Kelurahan Air Pacah dan Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh menunjukkan bahwa masyarakat hampir seluruhnya telah mengetahui bahwa wilayah pinggiran dari Kota Padang yang mereka tempati telah mengalami perkembangan dan perubahan, yang juga terkait dengan perubahan tata ruang wilayah Kota Padang. Dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Padang tahun 2008-2028 yang belum disahkan tersebut, kelurahan Lubuk Minturun, Kelurahan Gunung Sarik, dan Kelurahan Air Pacah yang akan dijadikan sebagai kawasan pusat pertumbuhan baru yang dihubungkan dengan jalan raya By Pass.

Kelurahan Lubuk Minturun Sungai Lareh, dan Kelurahan Gunung sarik merupakan kawasan-kawasan pusat perkembangan baru yang akan dikembangkan terkait dengan perubahan RTRW Kota Padang yang direncanakan. Namun berdasarkan peta (terlampir), pada wilayah penelitian tersebut juga terdapat kawasan lindung yang hendaknya pemanfaatannya harus disesuaikan dengan fungsinya. Seperti yang dikatakan oleh Puteri (2010), wilayah peralihan (pinggiran) di beberapa tempat dijadikan sebagai kawasan konservasi, kawasan resapan air atau sebagai kawasan cagar budaya yang patut dijaga kelestariannya. Namun saat ini akibat perluasan fungsi-fungsi wilayah perkotaan dan penambahan jumlah penduduk maka kawasan yang hendaknya dijadikan kawasan lindung untuk pelestarian pada akhirnya dimanfaatkan masyarakat juga untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup, yang pada akhirnya lama kelamaan akan berdampak negatif terhadap lingkungan.

D. Peraturan pemerintah (X4) Kebijakan pemerintah merupakan salah satu hal yang berperan dalam pengelolaan lahan-lahan

pertanian. Selain itu, pemerintah juga mempunyai peran yang sangat penting terutama dengan kewenangannya dengan mengeluarkan kebijakan dan upaya pengaturan konversi lahan-lahan pertanian ke non pertanian. diketahui bahwa peraturan pemerintah (komitmen pemerintah) masih tergolong rendah, yaitu sebesar 55% responden menyatakan bahwa komitmen pemerintah dalam pengelolaan lahan-lahan pertanian dan pengendalian konversi lahan pertanian ke non pertanian masih rendah. Hal ini terbukti tidak adanya Perda yang mengatur pengendalian perubahan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian. Salah seorang responden berpendapat, bahwa tidak adanya Perda mengenai larangan pengalih fungsian lahan pertanian ke non pertanian, membuat masyarakat dengan mudah mengubah fungsi lahan-lahan yang awalnya adalah lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Salah satu UU yang mengatur mengenai pemanfaatan lahan pertanian adalah UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang mengatur mengenai sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Salah satu cara pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yakni dengan pemberian insentif berupa keringanan pajak bumi dan bangunan (pasal 37 huruf a). pasal 38). Namun peningkatan nilai jual obyek pajak yang merupakan dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan khususnya di wilayah perkotaan, menjadikan kondisi petani semakin terjepit. Hasil pertanian yang bisa mereka nikmati dalam setahun akan terbebani dengan besarnya pajak tanah yang harus mereka bayar. Dengan

program pemberian insentif khusus kepada petani berupa keringanan pajak bumi dan bangunan, diharapkan bisa mengurangi beban mereka sehingga dapat meningkatkan kesejahterannya. Pada kenyataannya UU No. 41 Tahun 2009 tersebut belum dapat terlaksana sepenuhnya. Persoalannya berbenturan dengan banyaknya daerah yang belum menetapkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Karena itu, status lahannya belum dapat dipastikan. Kota Padang adalah salah satu kota yang mengalami “dilema” dalam hal mempertahankan lahan-lahan pertanian nya dan dalam upaya pengembangan dan perluasan kawasan perkotaan yang dituangkan dalam RTRW 2008-2028. Dikemukakan oleh salah seorang responden (Aparat Pemerintah Kelurahan Gunung Sarik) bahwa godaan developer untuk berinvestasi dengan membangun berbagai fasilitas perumahan di kawasan pinggiran kota Padang tidak bisa dihindari baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Jika sudah mendapatkan izin dari pemerintah daerah, maka pembangunan telah bisa dilaksanakan. Demikian juga dengan pembangunan-pembangunan rumah pribadi (perorangan), yang dibangun oleh masyarakat tidak melalui izin pemerintah, dan ini akan menyulitkan pemerintah untuk melarang masyarakat. Hal ini juga terkait karena tidak adanya Perda yang mengatur dan mengikat masyarakat dan pemerintah ditingkat yang lebih bawah untuk pelarangan pengalihfungsian lahan pertanian ke non pertanian tersebut. Fenomena meningkatnya jumlah penduduk ko Kota Padang, khususnya ke kawasan pinggiran kota Padang, berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan perumahan yang selanjutnya berimbas pada areal persawahan. Karena itulah, kebijakan pemerintah dan peraturan pemerintah khususnya

pemerintah daerah harus benar-benar serius dalam menangani permasalahan ini. Pemerintah hendaknya harus mensosialisasikan UU yang terkait dengan konversi lahan pertanian ke non pertanian tersebut, karena kebanyakan masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan atau UU yang mengatur tentang perubahan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, khususnya untuk UU No. 41 Tahun 2009. Jadi, hal yang paling utama dalam pelaksanaan UU ini adalah sosialisasi dan pelaksanaan secara konsisten oleh pemerintah sendiri.

Potensi bencana alam (X5)

Bencana alam yang saat ini berpotensi mengancam Sumatera Barat, khususnya Kota Padang adalah gempa bumi dan bencana tsunami. Bencana alam gempa bumi tidak bisa diprediksikan kapan terjadinya, namun Kota Padang merupakan kawasan berpotensi gempa, baik gempa dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Kota Padang adalah salah satu wilayah yang terletak di kawasan pesisir pantai Sumatera Barat. Diketahui bahwa Provinsi Sumatera Barat berada di antara pertemuan dua lempeng benua besar (lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia) dan patahan (sesar) Semangko. Di dekat pertemuan lempeng terdapat patahan Mentawai. Ketiganya merupakan daerah seismik aktif. Menurut catatan ahli gempa wilayah Sumatera Barat memiliki siklus 200 tahunan gempa besar yang pada awal abad ke-21, dan telah memasuki masa berulang siklus (United States Geological Survey, 2009). Gempa yang terjadi pada September 2009 tersebut pada akhirnya membuat masyarakat Kota Padang mengalami trauma, diiringi dengan potensi tsunami yang semakin membuat masyarakat merasa takut untuk tinggal di kawasan pesisir Kota Padang. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh Trisia, Ramadhani dan Evelina (2009), bencana gempa dan tsunami di daerah Aceh dan Nias Sumatera Utara, serta gempa di Kota Padang tahun 2009 diperkirakan membawa dampak terhadap perubahan perkembangan Kota Padang. Pasca terjadinya bencana tersebut, isu tentang tsunami yang melanda Kota Padang pun berkembang, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan pada masyarakat dalam kecenderungan memilih lokasi bermukim yang jauh dari daerah pantai (jauh dari pusat kota) yang selama ini merupakan daerah pinggiran kota. Dengan adanya kecenderungan tersebut daerah pinggiran yang dulunya dengan kepadatan rendah pasca isu tsunami menjadi pilihan untuk lokasi bermukim masyarakat Kota Padang. Berdasarkan jawaban responden mengenai potensi bencana alam di Kota Padang, termasuk pada Kategori tinggi. Masyarakat mengetahui bahwa wilayah Kota Padang yang terletak di kawasan pesisir pantai mempunyai kerentanan yang cukup tinggi terhadap bencana alam. Hal ini mengakibatkan banyaknya masyarakat berpindah ke wilayah pinggiran kota yang mempunyai kerentanan rendah terhadap potensi bencana alam gempa bumi dan tsunami.

F. Faktor Sosial (Berkurangnya nilai-nilai budaya masyarakat dalam pengelolaan lahan-lahan pertanian) (X6) Budaya atau kebudayaan merupakan kumpulan pengetahuan secara sosial diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Supardan, 2007:202). Selain itu, budaya juga merupakan sistem apatif dari keyakinan perilaku yang fungsi primernya adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik dan sosialnya (Steward, 1995 dalam Supardan, 2007:203). Kebudayaan juga terkait dengan simbol-simbol, makna-makna dan nilai-nilai yang dimiliki bersama, dapat diidentifikasi dan bersifat

publik (Geertz, 1983 dan Scheider, 1968 dalam Supardan, 2007: 202). Terkait dengan penelitian ini, nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat (baik masyarakat yang terkait langsung dengan bidang pertanian maupun masyarakat yang tidak terkait langsung dalam bidang pertanian) dalam pengelolaan lahan-lahan pertanian saat ini sudah mulai mengalami degradasi. Terutama pada masyarakat yang hidup dipinggiran kota (disebut wilayah urban), pandangan masyarakat terhadap lahan-lahan pertanian saat ini sudah menuju kearah yang negatif, yang berarti bahwa pekerjaan petani, yang terkait dengan pengelolaan lahan-lahan pertanian, saat ini bukan lagi menjadi prioritas atau sudah mengalami pergeseran. Berdasarkan data yang diperoleh di lokasi penelitian, pendapat masyarakat mengenai pudarnya nilai-nilai budaya masyarakat dalam pengelolaan lahan-lahan pertanian termasuk dalam kategori tinggi. Artinya masyarakat menyadari bahwa saat ini telah terjadi perubahan nilai-nilai budaya masyarakat dalam memandang lahan pertanian. Ini terjadi khususnya pada masyarakat pedesaan yang tinggal dekat atau yang termasuk dalam wilayah administrasi perkotaan. Ilham, Syaukat dan Friyatno (2000), mengatakan bahwa sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi yang memadai telah membuka wawasan penduduk pedesaan terhadap dunia baru diluar lingkungannya. Khususnya generasi muda merasa pekerjaan yang bergerak di bidang pertanian adalah pekerjaan yang ketinggalan zaman dan belum modern. Persepsi generasi muda terhadap profesi petani tidak jauh berbeda dengan masyarakat perkotaan, bahwa profesi petani adalah pekerjaan kotor, sengsara dan kurang bergengsi. Seperti yang diungkapkan salah seorang responden yang mengatakan bahwa pekerjaan

bertani bukan lagi pekerjaan yang menarik bagi anak-anak muda zaman sekarang, mereka lebih tertarik dengan pekerjaan lain diluar bidang pertanian seperti berdagang maupun menjadi sopir atau yang bergerak dibidang jasa, atau jika mereka sekolah sampai pada perguruan tinggi, anak-anak sekarang lebih suka menjadi guru, PNS maupun pegawai swasta. Akibat cara pandang yang seperti itulah citra petani dibenak generasi muda sekaran semakin menurun. Dengan demikian lahan pertanian bukan lagi merupakan aset sosial semata. Aset sosial yang dimaksud disini adalah lahan pertanian pada masa lalu adalah lahan yang selain dapat memberikan keuntungan bagi penyediaan bahan pangan, namun juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk tumbuh dan berkembangnya kebudayaan tradisional, seperti adanya kerjasama atau gotong royong, tetapi saat ini lebih diandalkan sebagai aset ekonomi atau modal kerja bila mereka beralih profesi diluar bidang pertanian. Tidak semua petani sepakat bahwa lahan sawah merupakan media gotong royong. Argumentasi yang mendasari pandangan tersebut antara lain adalah kenyataan telah terjadinya perubahan struktur ekonomi dan adanya desakan kebutuhan ekonomi rumah tangga tani yang semakin tinggi, yang menyebabkan terjadinya perubahan sifat kegotongroyongan masyarakat desa menuju ke arah sifat individualistis. Modernisasi pertanian juga memberikan andil dalam memudahkan sifat kegotong royongan masyarakat desa, dimana mekanisasi dan penerapan teknologi intensifikasi telah merubah sistem kelembagaan dalam pengerjaan sawah, yang tadinya dilakukan secara gotongroyong dan sambat-sinambat, sekarang digantikan dengan sistem upah harian atau borongan. Ilham (2000) mengatakan bahwa pemilik lahan-lahan

pertanian tidak keberatan melepaskan lahan pertaniannya untuk dialihfungsikan pada penggunaan non pertanian. Keadaan tersebut juga semakin diperburuk dengan kondisi ekonomi seperti saat ini, dimana kesempatan kerja formal semakin kecil. Tidak sedikit petani menjual lahannya untuk biaya masuk kerja pada lapangan kerja formal, atau membeli kendaraan untuk angkutan umum maupun untuk modal usaha lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani mengkonversi lahan pertanian ke lahan non pertanian adalah tingkat pendapatan petani, perubahan tata ruang wilayah, peraturan pemerintah, potensi bencana alam dan faktor social (berkurangnya nilai-nilai budaya masyarakat dalam pengelolaan lahan-lahan pertanian).

SARAN

1. Beberapa upaya yang dapat kita lakukan sebagai pemerhati lingkungan adalah memberikan pengarahan dan advokasi kepada masyarakat agar lebih mengetahui dan lebih menghargai lahan-lahan pertanian yang dimiliki, yang masih tersisa dan yang masih dapat diusahakan. Salah satu cara adalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan di bidang pertanian, serta memberikan pelatihan-pelatihan dan memperkenalkan inovasi-inovasi terbaru mengenai pengelolaan lahan-lahan pertanian untuk dapat lebih memaksimalkan lahan-lahan pertanian yang masih tersisa yang bermanfaat bagi keberlanjutan lingkungan.

2. Untuk meningkatkan efisiensi lahan lahan pertanian produktif yang masih ada maka dapat dikembangkan beberapa alternatif dengan menciptakan peluang-peluang baru di bidang pertanian seperti kawasan agrowisata yang akan berdampak positif bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Y. (2005). Konversi Lahan Pertanian dan Struktur Agraria. [http://yohanbudiman.blogspot.com /](http://yohanbudiman.blogspot.com/)
- Harian Singgalang (2010). Revisi RTRW. 2.900 Hektar Lahan Pertanian Bakal Dihapus. Padang, Singgalang. 14 Agustus 2010.
- Harian Singgalang (2011). Nasib Petani Kian tergerus. Padang, Singgalang. 4 Mei 2011.
- Hermon. D., (2009). Dinamika Permukiman dan Arah Kebijakan Pengembangan Permukiman pada Kawasan Rawan Bencana Longsor di Kota Padang Sumatera Barat. Disertasi. Sekolah Pasca Sarjana IPB. Bogor.
- Ilham, Syaikat, Friyatno, (2000). Perkembangan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah serta Dampak Ekonominya. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian dan Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.

- Padangmedia.com. (2011). 4,45 Hektar Sawah Gagal Panen. Artikel. 20 Mei 2011. www.padangmedia.com
- Pemerintah Kota Padang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang 2004-2013. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Padang.
- Puteri, S.F., Urban Sprawl dan Implikasinya Terhadap Lingkungan di Kawasan Pinggiran dan Perkotaan. (2010). <http://fauziasp.tumblr.com>
- Ruswandi. A., Rustiadi. E., Mudikdjo. K., (2007). Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani dan Perkembangan Wilayah: Studi Kasus Daerah Bandang Utara. Jurnal Agro Ekonomi. Volume 25 No 2.
- Setiawan, I. (2009). Peran Sektor Pertanian dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI.
- Supardan, D., Pengantar Ilmu Sosial. Sebuah Kajian Pendekatan Struktural, (2007). Penerbit Bumi Aksara. Bandung.
- Trisia. N., Rahmadani. Y., Evelina.D., (2009). Fenomena Kecenderungan Pemilihan Lokasi Bermukim Di Kota Padang Pasca Isu Tsunami Dan Implikasi Terhadap Penataan Ruang Kota. Makalah. Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota. Universita Bung Hatta. Padang.
- Thesiwati.A.S., (2006). Analisis Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan di Sepanjang Daerah Aliran Sungai Batang Kuranji. Thesis.
- Program Pascasarjana Universitas Andalas. Padang. Undang-Undang Nomor 41. Tahun 2009. Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.